

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sebagai Sarana Alternatif Layanan Literasi Dasar

Abdul Holik

email: abdullah36kh@gmail.com

Abstrak

Perpustakaan bertujuan mendukung program belajar masyarakat sepanjang hayat. Karena itu, pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air, menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan, terjemahan, alih aksara, alih suara ke tulisan di setiap perpustakaan milik pemerintah. Perpustakaan pemerintah dengan program-programnya, sementara perpustakaan mandiri dapat menjadi pelaksana program tersebut. TBM, sebagai salah satu bentuk perpustakaan mandiri yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi pelengkap program beberapa program lainnya seperti Kesetaraan (Paket A,B,C) Keaksaraan Fungsional, Kursus, PAUD. TBM mampu berkiprah, menyumbang kegiatan yang mendukung program pemerintah dalam meningkatkan gerakan literasi baik secara lokal maupun nasional. Kehadiran TBM bukan hanya pelengkap tapi telah mampu menjembatani celah antara masyarakat dengan perpustakaan.

Kata kunci: TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Literasi Dasar

* Dosen Uninus dan Pengelola TBM Arjasari Kabupaten Bandung

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan mengamanatkan pada pemerintah pentingnya penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan bagi masyarakat. Amanat tersebut dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia menuju bangsa yang cerdas, berwawasan dan berpengetahuan luas, cakap, kreatif, mandiri serta bertanggung jawab. Penyelenggaraan perpustakaan juga bertujuan mendukung program belajar masyarakat sepanjang hayat.

Untuk memuwujudkan amanat tersebut, pada pasal 7 butir c dan d pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air, menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan, terjemahan, alih aksara, alih suara ke tulisan di setiap perpustakaan milik pemerintah. Jika amanat tersebut dilaksanakan secara kondisten maka jumlah ideal perpustakaan milik pemerintah yang ada, akan nampak sebagaimana dalam tabel berikut;

Tabel 1. Jumlah Ideal Perpustakaan Pemerintah di Tanah Air

No	Jenis Perpustakaan Pemerintah	Lokasi Gedung Perpustakaan	Jumlah	Keterangan
1	Perpustakaan Nasional	Di Ibu kota Negara (Jakarta)	1	Melayani masyarakat seluruh Indonesia
2	Perpustakaan Provinsi	Di pusat ibu kota provinsi	34	Melayani masyarakat yang ada di provinsi tersebut
3	Perpustakaan Kabupaten/ Kotamadya	Di pusat ibu kota kabupaten/ kotamadya	514	Melayani masyarakat yang ada di kabupaten/ kotamadya tersebut
4	Perpustakaan Kecamatan	Di Gedung Pemerintahan kecamatan	7094	Melayani masyarakat yang ada di kecamatan tersebut
5	Perpustakaan Desa	Di Gedung Pemerintahan Desa	74957	Melayani masyarakat yang ada di desa tersebut

6	Perpustakaan Kelurahan	Di Gedung Pemerintahan Kelurahan	8490	Melayani masyarakat yang ada di kelurahan tersebut
---	------------------------	----------------------------------	------	--

Diolah dari berbagai sumber

Dari tabel diatas, pemerintah seharusnya memiliki sekitar 31.030 perpustakaan di seluruh tanah air. Jika penduduk Indonesia yang sudah mampu membaca sekitar 200 juta orang, maka satu perpustakaan, mampu melayani sekitar 445 penduduk dalam membaca, memberikan dukungan penelitian, memberikan informasi yang aktual dan faktual serta memberikan layanan rekreasi keluarga setiap harinya. Ini angka ideal jika dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Jerman, Italia, Malaysia, dan Singapura. Negara-negara tersebut hanya mampu melayani masyarakatnya sekitar 1:800 orang per harinya. Padahal penduduk di negara negara tersebut termasuk memiliki kemampuan rata-rata membaca 1 orang 12 buku dalam satu tahun. Berbanding terbalik dengan penduduk Indonesia yang memiliki rata rata membaca 2 buku dalam satu tahun (Dispusipda, 2018).

Realitas

Angka dalam tabel 1, hanya angka ideal bukan kondisi riil. Karena jumlah perpustakaan yang ada di lapangan tidaklah sebanyak angka tersebut. Dibuktikan dengan beberapa kecamatan yang ada disekitar tempat tinggal penulis di Kabupaten Bandung. Berdasarkan survey lapangan (Holik,A., 2018) tidak semua kecamatan dan desa memiliki perpustakaan sebagaimana amanat Undang-undang. Pada tahun 2018, dari 31 kecamatan hanya 26 kecamatan yang telah memiliki perpustakaan khusus kecamatan. Sementara dari 270 desa, hanya 202 desa yang memiliki perpustakaan khusus desa, dari 10 kelurahan hanya 8 kelurahan yang telah memiliki perpustakaan khusus kelurahan. Jika dijumlahkan perpustakaan pemerintah yang ada dikabupaten Bandung sekitar 230 perpustakaan. Sementara jumlah penduduk pada tahun 2017 sekitar

3.522.724 (BPS. Kab Bandung, 2010). Ini berarti satu perpustakaan pemerintah melayani sekitar 10.870 per harinya, jika diasumsikan penduduk Kabupaten Bandung yang bisa membaca sekitar 2,5 juta orang.

Kondisi tersebut diatas menunjukkan jumlah layanan perpustakaan yang tidak ideal. Belum lagi dari sisi pengelolaan lembaga, baik penyediaan layanan bacaan, pengolahan bahan bacaan, kelayakan sarana membaca, program kegiatan yang dilakukan hingga sumber daya manusia yang menjadi petugas layanan. Karena pada umumnya petugas layanan perpustakaan tersebut dijabat rangkap oleh salah satu pegawai yang ada ditempat tersebut. Bukan berdasarkan kompetensi sebagai pustakawan. Hal ini berpengaruh terhadap penyelenggaraan perpustakaan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut;

Tabel 2. Hubungan Perpustakaan dengan Lembaga Tempatnya Bernaung

Jenis Aktifitas	Pelaksana	Keterangan
Menentukan tujuan, visi, misi dan sasaran lembaga	Ditunjuk salah satu pejabat untuk mengelola perpustakaan	Menginduk pada lembaga tempat perpustakaan tersebut bernaung
Pemberian layanan	Didelegasikan pada staf yang ada dibawahnya	Memberikan layanan setelah mengerjakan pekerjaan utama
Waktu layanan	Petugas layanan	Disesuaikan dengan jam kerja lembaga tersebut
Pengolahan Bahan Bacaan	Petugas khusus	Bahan bacaan disesuaikan dengan anggaran
Pengadaan Dana	Petugas mengajukan	Jumlah anggaran ditentukan oleh pimpinan lembaga tempat perpustakaan bernaung
Struktur Pengelola	Pejabat yang ditunjuk	Ditetapkan oleh pimpinan lembaga tempat perpustakaan bernaung
Mitra	Pejabat yang ditunjuk	Harus seijin pimpinan lembaga tempat perpustakaan bernaung

Kondisi Ruang	Ditentukan oleh pimpinan lembaga	Menginduk pada lembaga tempat perpustakaan bernaung (kadang posisi ruangan perpustakaan tidak strategis)
Gaji Pengelola	Ditentukan oleh pimpinan lembaga	Memperoleh tambahan pendapatan dari mengelola perpustakaan
Jangkauan layanan	Petugas layanan	Masyarakat yang berkunjung ke lembaga tersebut

Diolah dari berbagai sumber

Dari tabel 2 terlihat, dominasi lembaga induk terhadap aktifitas perpustakaan sangat tinggi yang berpengaruh terhadap kegiatan layanan. Bukan hanya kompetensi pengelola, keberadaan perpustakaan yang ada dalam naungan lembaga pemerintah dipengaruhi oleh kebijakan yang rigid dan tidak fleksibel, menyangkut pengadaan koleksi pustaka, kemudahan berkomunikasi, sosialisasi program kegiatan, hingga penggunaan teknologi informasi yang rendah. Bahkan untuk mengajukan bahan bacaan yang dibutuhkan pengunjung memerlukan ajuan anggaran yang panjang, minimal satu tahun yang berimbas pada koleksi bacaan yang out of date.

Pada sisi lain, kepedulian para pemangku kebijakan terhadap kesejahteraan khusus pengelola sering abai, kondisi ruang layanan yang apa adanya, rak pajang buku yang kurang representatif menyebabkan rendahnya motivasi kerja pengelola perpustakaan. Berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya pemangku kebijakan pada level tersebut beranggapan bahwa perpustakaan hanyalah komponen pelengkap gedung bukan bagian yang integral dari pendidikan sepanjang hayat masyarakat. Sehingga perhatiannya terhadap perpustakaan sangat kurang.

Kesadaran Masyarakat

Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan perpustakaan secara mandiri di lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa orang ada yang menyelenggarakan perpustakaan di terminal bis, di stasiun kereta api, di mushola, di tempat cukur rambut, di tempat perbelanjaan modern hingga rumah sakit. Dengan motivasi ingin berbagi informasi dan ilmu pengetahuan dengan sesama. Tampilanpun dibuat sederhana, bersahabat, dan mudah diakses. Tidak kaku, rigid dan dingin. Bahkan muncul varian nama perpustakaan seperti pojok baca, sudut baca, rumah baca, rumah buku, jendela ilmu, jendela buku, rumah pintar (rumpin) hingga taman baca masyarakat (TBM). Penataan perpustakaan dibuat nyaman.

Dari kreatifitas tersebut melahirkan pola layanan yang unik. Para pengelola perpustakaan mandiri tidak terikat oleh jam layanan. Mereka menawarkan bacaan pada pagi, siang hingga malam hari. Tidak terikat oleh kebijakan lembaga naungan. Tidak terikat oleh anggaran, memberikan layanan sesuai dengan kemampuan dana yang ada. Tidak jarang antar sesama pengelola perpustakaan mandiri patungan untuk menyelenggarakan sebuah event tertentu.

Pada sisi layanan reguler, perpustakaan mandiri lebih kreatif. Layanan tidak hanya pada empat fungsi perpustakaan, tetapi merambah pada kegiatan unik lainnya seperti menjadi tempat pelaksanaan pos yandu balita, tempat pelatihan, tempat seminar, menyelenggarakan workshop, tempat diskusi warga, tempat pemungutan suara, tempat bermain anak anak, tempat imunisasi bahkan menjadi tempat belajar informasi dan teknologi masyarakat sekitar. Masyarakat juga dapat menikmati bacaan sambil ngemil dan minum kopi, membaca sambil menggendong anaknya, baca buku dibawah pohon serta sederet aktifitas unik lainnya. Aktifitas ini mampu menghilangkan stigma perpustakaan yang kaku dan dingin. Masyarakat diajak belajar tidak dengan menghajar, diajak untuk terus menambah ilmu tidak dengan menggurui. Masyarakat diajak membaca dengan rileks penuh keakraban. Kondisi ini secara perlahan mampu membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memperoleh

informasi melalui perpustakaan, dapat menjadi modal awal dalam meningkatkan kegemaran dan kebiasaan membaca di lingkungan masyarakat.

Namun demikian keberadaan perpustakaan milik pemerintah desa dan kecamatan tetap tidak bisa dihilangkan. Sekecil apapun manfaat yang diberikan oleh perpustakaan tersebut tetap memberikan kontribusi bagi peningkatan minat baca masyarakat. Karena membangun budaya gemar membaca adalah tanggung jawab bersama. Yang dibutuhkan adalah sinergi yang dibangun antara aparat pemerintah dengan para pengelola perpustakaan mandiri. Ada pembagian bidang garapan dalam kegiatan. Perpustakaan pemerintah dengan program-programnya, sementara perpustakaan mandiri dapat menjadi pelaksana program tersebut.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Sebagai salah satu bentuk perpustakaan mandiri yang diselenggarakan oleh masyarakat, nama TBM pada awalnya lahir sebagai salah satu program pendidikan luar sekolah yang diekspos oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) awal tahun 2000. TBM sebagai salah satu bagian dari kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). TBM menjadi pelengkap program beberapa program lainnya seperti Kesetaraan (Paket A,B,C) Keaksaraan Fungsional, Kursus, PAUD. Tujuan awal penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan non formal adalah agar warga belajar yang sudah bisa membaca tidak buta aksara kembali dan terbebas dari buta huruf (Kemendikbud, 2010).

Dalam perkembangannya, kehadiran TBM tidak lagi sebagai alat pelengkap program PKBM. TBM telah menjelma menjadi program unggulan yang mampu menyelenggarakan kegiatan melebihi program induknya. Saat ini TBM dapat diselenggarakan oleh masyarakat dari kalangan apapun, bebas bersyarat tanpa harus berada di bawah PKBM. Dan sebagaimana tujuannya, aktifitas di TBM identik dengan

perpustakaan yang menyediakan bahan bacaan. Di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan dan penyebarluasan segala macam informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam dalam berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, video, komputer dan lain-lain. Semua sumber informasi disusun berdasarkan sistem tertentu dan dipergunakan untuk kepentingan belajar, diskusi, bedah buku, pelatihan menulis dan kegiatan sejenisnya yang diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ada tiga jenis TBM yang diakui keberadaannya oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 antara lain;

a. TBM Mandiri

TBM Mandiri adalah TBM yang didirikan oleh perseorangan, tidak terikat oleh lembaga manapun baik pemerintah maupun swasta. Akan tetapi ijin operasionalnya harus menginduk kepada Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Kegiatan yang dilakukan tergantung pada tempat tinggal TBM itu berada, seperti TBM yang berada di daerah pantai maka kegiatan dan bahan bacaannya lebih diarahkan pada keunggulan daerah tersebut. Jika TBM tersebut berada di daerah pertanian maka bahan bacaan yang berhubungan dengan pertanian, pelatihan bercocok tanam, budidaya jagung dan lain-lain. Dana kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi bisa bersinergi dengan swasta atau pemerintah untuk memperoleh dana.

b. TBM Ruang Publik.

TBM Ruang Publik adalah TBM yang berada di ruang umum seperti yang ada di terminal, rumah sakit dan di mall. Pada tahun 2010 kurang lebih ada 20 TBM Ruang Publik yang telah didirikan oleh pemerintah. Seperti TBM@Mall nya di Istana Plaza Pasir Kaliki Bandung, TBM@Hospital Rumah Sakit Islam Wonokromo Surabaya, TBM@Mall di Carefour Kota Serang. Pembiayaan awal TBM ini dari pemerintah dengan dana sebesar Rp. 200 juta. Pengelolaan selanjutnya diserahkan pada pengelola TBM yang ada disekitarnya. Namun saat ini keberadaan beberapa TBM@mall mengalami kemunduran, mungkin sedang mati suri.

c. TBM Lembaga.

TBM Lembaga adalah model TBM yang ada dibawah lembaga tertentu seperti Lembaga PKBM, terutama lembaga PKBM yang memiliki program pendidikan Kesetaraan dan Program Pendidikan Paket A, B dan C. PKBM yang memiliki program tersebut diwajibkan memiliki TBM dengan tujuan untuk menjaga kemampuan melek huruf warga belajar. Bahan bacaan yang ada di TBM ini tidak berdasarkan pada keunggulan daerah melainkan pada kebutuhan bacaan warga belajar yang ada dilembaganya. Aktifitas TBM model ini tergantung pada lembaga induk. Jika lembaga induknya memiliki banyak warga belajar dan aktif mengadakan pembelajaran disetiap harinya, TBM nya akan ramai melayani warga belajar. Namun jika warga belajarnya tidak ada, maka layanan TBM nya pun tutup.

Dari ketiga jenis TBM diatas, TBM mandirilah yang berkembang pesat hingga saat ini. Tetap eksis memberikan layanan kepada masyarakat. Mulai dari layanan baca, menulis, berhitung, menggambar, les bahasa, hingga layanan empat fungsi perpustakaan. Secara kuantitas jumlah TBM di Kabupaten Bandung pada tahun 2014, dari 31 Kecamatan terdapat sebanyak 85 TBM mandiri. Kecamatan yang paling banyak TBMnya adalah kecamatan Arjasari sekitar 13 TBM mandiri (FTBM Kab Bandung, 2014).

Layanan Literasi Dasar di TBM

Sebagaimana disampaikan diatas, bahwa bentuk kegiatan TBM yang mandiri mampu memberikan layanan melebihi kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan desa dan kecamatan. Baik layanan literasi dasar maupun layanan empat fungsi perpustakaan. Layanan literasi Dasar sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencakup baca-tulis, numerasi, sains, digital, financial, budaya dan kewargaan (Kemendikbud, 2018). Sedangkan layanan empat fungsi perpustakaan mencakup layanan edukasi, layanan informasi, layanan penelitian dan layanan rekreasi.

Beberapa contoh layanan kegiatan literasi dasar yang dilakukan beberapa pengelola TBM mandiri sebagaimana berikut (TBM Sukamulya Cerdas, 2018);

- a. Malaikat kecil pecinta lingkungan; berisi kegiatan penyadaran masyarakat berupa kegiatan anak kecil yang harus mengambil sampah yang tidak dimasukkan ke dalam tempat sampah. Kegiatan ini dilakukan setiap hari minggu oleh anak-anak usia sekolah.
- b. Gerakan Minggu Membaca; berisi kegiatan membaca bersama secara berkeliling dari satu TBM ke TBM berikutnya secara bergiliran. Ini salah satu program kegiatan dalam rangka membentuk kampung literasi.
- c. Gerakan Membaca Sepuluh Menit; berupa kegiatan membaca wajib selama sepuluh menit bagi pengunjung tbm sebelum melakukan aktifitas lainnya. Pengunjung memilih buku yang disukainya kemudian membaca dihadapan petugas selama sepuluh menit. Setelah itu pengunjung dibebaskan untuk berkegiatan. Kegiatan ini ditujukan bagi pengunjung anak usia sekolah.
- d. *Culinary Nigth* Bersama Gerobag Baca; berwirausaha sambil membaca bahan bacaan yang ditawarkan kepada pembeli. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali pada malam minggu.
- e. Kantong Literasi; menitipkan sebanyak 50 buku setiap minggunya di setiap sekolah PAUD yang ada disekitar TBM.
- f. Hibah Buku; memberikan buku yang ada di TBM kepada komunitas literasi lainnya untuk dijadikan koleksi bacaan. Kegiatan ini didukung penerbit yang ada lingkungan TBM.
- g. Wisata Buku; adalah kegiatan mencari bahan bacaan yang diinginkan oleh pengunjung. Biasanya pengunjung tertentu diajak ke toko buku untuk memilih buku yang ingin dibacanya. Tapi buku tersebut disimpan di TBM.
- h. Bedah Buku; setelah buku tersebut di beli kemudian dibedah oleh beberapa orang pengelola. Biasanya dilakukan satu bulan sekali bersama pengunjung yang lainnya.
- i. *Parenting*; berupa diskusi khusus dengan mendatangkan narasumber

dari luar. Adapaun dananya diperoleh dari donatur. Materi yang dikaji sesuai permintaan pengunjung

- j. Pelatihan mendongeng; diberikan kepada pengunjung yang berprofesi sebagai guru PAUD. Biasanya dilakukan setiap tiga atau enam bulan sekali.
- k. Pelatihan Menulis; diperuntukan bagi pengunjung yang sudah memiliki kecakapan dalam menulis. Biasanya diberikan kepada mahasiswa atau pengunjung dewasa yang memiliki keinginan untuk belajar menulis.
- l. Pelatihan kewirausahaan; diperuntukan bagi pemuda yang belum memiliki pekerjaan atau yang sudah bekerja agar memiliki kemampuan berwirausaha. Biasanya narasumber yang didatangkan memiliki produk yang dapat ditiru atau mau bekerjasama dengan para peserta pelatihan.
- m. Keterampilan bagi kaum perempuan; berisi kegiatan pelatihan memasak berdasarkan resep dari buku yang ada di TBM. Hasilnya dibagikan kepada peserta pelatihan.
- n. Pelatihan Seni Budaya; berisi kegiatan pelatihan tari, mendongeng, main music dan beberapa kegiatan seni lainnya.
- o. Belajar Permainan Tradisional; berisi kegiatan mengenal kembali permainan tradisional bangsa Indonesia yang sangat melegenda.
- p. Kapsul Baca; sebuah kapsul yang berisi tugas membaca beberapa halaman buku, kemudian menuliskan hasil bacaanya pada buku khusus, kemudian memperoleh reward dari pengelola.
- q. Karnaval Buku; layaknya karnaval perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, maka karnaval buku berisi arak arakan bahan bacaan mengelilingi lingkungan warga. Beberapa warga tampil menggunakan pakaian adatnya masing masing dengan membawa bahan bacaan.


Beberapa contoh kegiatan literasi di atas, belum mewakili seluruh kegiatan yang dilakukan para pengelola perpustakaan mandiri seluruhnya. Masih banyak kegiatan literasi lainnya yang lebih monumental seperti

pelatihan menulis puisi, menulis cerpen, menulis scenario film hingga pelatihan membuat film documenter. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh pengelola TBM secara berkala melalui kerjasama dengan para donatur dan narasumber yang konsern terhadap pemberdayaan perpustakaan.

Simpulan

TBM sebagai salah satu bentuk perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri telah mampu berkiprah, menyumbang kegiatan yang mendukung program pemerintah dalam meningkatkan gerakan literasi baik secara lokal maupun nasional. Kehadiran TBM bukan hanya pelengkap tapi telah mampu menjembatani celah antara masyarakat dengan perpustakaan.

Tampilan fisik TBM yang sederhana tapi ada juga TBM yang memiliki tampilan mewah, layanan yang rileks, penuh canda dalam layanan, terasa lebih bersahabat. Dimana pengunjung dapat melahap informasi sambil ngobrol, memahami bacaan sambil menggendong anaknya. Menyelenggarakan pelatihan dengan ceria, meski dengan anggaran dana yang minim. Semuanya bermuara pada motivasi ingin berbagi dengan sesama.

Pada sisi lain, pemberdayaan perpustakaan harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektor. Semua pemangku kebijakan memiliki kewajiban yang sama dalam memberdayakan perpustakaan yang ada di lingkungannya masing-masing. Pemberdayaan perpustakaan adalah langkah strategis dalam mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat agar terjadi peningkatan kualitas hidup. Keterampilan praktis masyarakat akan bertambah jika bacaan berada di dekatnya. Disinilah peran penting perpustakaan dengan segala bentuknya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. 

Referensi

- DISPUSIPDA. 2018. Pedoman Pembudayaan Kegemaran Membaca (Gerakan Literasi keluarga, Satuan Pendidikan/Sekolah dan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Perpustakaan), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
- Forum TBM Kab. Bandung. 2014. Data TBM Mandiri versi DISDIK, tersedia di <https://forumtbmkabbandung.wordpress.com/category/data-tbm/data-tbm-versi-disdik/> diunduh pada Juli 2020.
- Holik, Abdul. 2020. Mengelola Taman Baca dengan Mudah. Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Holik, Abdul. 2013. Taman Bacaan dalam Rekaman Relawan. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Kemendikbud. Dikdas. 2018. Literasi adalah Kompetensi Abad XXI, tersedia di <https://pgdikdas.kemendikbud.go.id/read-new/literasi-adalah-kompetensi-abad-xxi>, diunduh pada Juli 2020.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

